

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Hamid dan S, Attamini, *Hukum tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan*, (Jakarta: Fakultas hukum UI, 1993)
- Amiek Soemarmi, *Buku Ajar Hukum Perikanan*, (Semarang: Undip Press, 2016)
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001)
- Hotman P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. (Jakarta: Airlangga, 2010)
- Jazim Hamidi, *Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999)
- Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga, 2009),
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media 2009)
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011)
- Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)
- Satria arif, *Politik Kelautan dan Perikanan*, (Bogor: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016)
- SF Marbun dan Mahfud MD, *Pokok Pokok Hukum Administrasi Negara*. (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2000)
- Siombo Marhaeni Rial, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010)
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Soemarmi Amiek, *Buku Ajar Hukum Perikanan*, (Semarang: UNDIP PERS, 2016)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1984)

Solihin Akhmad, *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*, (Bandung: Nuansa Aulis, 2010)

Suko Wiyono, *Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pembentukan Perda Partisipatif, Faza Media, 2006)

Widjaja HAW, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Provinsi Jawa Tengah

C. JURNAL

- Afandi Mahmuddin, *Implementasi Kebijakan Retribusi Izin Usaha Perikanan*, Jurnal Katalogis. Vol.5, No.11, 2017, 162-174
- Syamsiar Hidayat, *Pelayanan Izin Usaha Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan*, Jurnal Ilmu Perikanan. Vol.3, No.1, 2013, 1
- Shinta Yuniarta, *Kinerja Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan*, Jurnal Penelitian Ikan. Vol.2, No.1, 2011, 51-64
- Amiek Soemarmi, *Wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Mengatur Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Pati*, Jurnal Penelitian Perikanan Vol.5, No.2, Tahun 2016
- Widya Larasati, *Penanganan Pengaduan Masyarakat Sebagai Pendukung Iklim Organisasi*, Journal article Profetik, Vol. 10, No. 1, Tahun 2016